

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh individu serta telah disepakati oleh setiap negara. Kualitas pendidikan dalam suatu negara merupakan penentu kemajuan dari negara tersebut (Kurniawati, 2022). Kualitas pendidikan yang buruk akan membuat negara tersebut mengalami ketertinggalan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM. Kualitas SDM terlihat melalui dari tingkat pendidikan suatu negara. Jika kualitas tingkat pendidikan semakin tinggi, maka akan kualitas SDM di negara tersebut akan semakin berkualitas (Kemenko PMK, 2022). Salah satu sistem pendidikan nasional yaitu pendidikan tinggi memiliki peran yang strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas (Simatupang & Yuhertiana, 2021). Pendidikan tinggi mampu mengembangkan berbagai teknologi dan pengetahuan untuk menghadapi arus globalisasi disegala bidang.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2022), saat ini jumlah perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia dalam naungan Kemendikbud adalah sebanyak 125 perguruan tinggi. Sedangkan perguruan tinggi swasta (PTS) sebanyak 2.982 perguruan tinggi. Sehingga jumlah total PTN dan PTS di seluruh Indonesia adalah sebanyak 3.107 perguruan tinggi. Kemudian pada wilayah Jawa Timur, jumlah PTN dibawah Kemendikbud adalah sejumlah 17 perguruan tinggi. Sedangkan PTS adalah sejumlah 324 perguruan tinggi. Agar mahasiswa dapat memperoleh capaian proses pembelajaran

yang diharapkan, saat ini perguruan tinggi sangat dituntut untuk melaksanakan proses pembelajaran inovatif. Misi utama dalam pendidikan tinggi adalah mencetak SDM yang berkualitas, kompetitif, dan kompeten. Sehingga perguruan tinggi di Indonesia harus melakukan reorientasi dan transformasi untuk menjadi sistem yang sejalan dengan misinya. Keberadaan perguruan tinggi ini sangat penting bagi peningkatan kualitas SDM. Peluang serta kesempatan kerja dapat dibuka lebih luas dengan pengetahuan yang mendalam dengan menempuh pendidikan tinggi.

Pendidikan tinggi di Indonesia saat ini dinilai belum mampu menghasilkan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan kerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauziyah menyatakan lulusan Diploma dan Sarjana mendominasi pengangguran di Indonesia kurang lebih 12%. Seperti yang tertulis dalam berita UGM berikut ini:

**“UGM.ac.id-** Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Ida Fauziyah, mengatakan sekitar 12 persen pengangguran di Indonesia saat ini didominasi oleh lulusan sarjana dan diploma. Menurutnya, besarnya jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi ini disebabkan tidak adanya *link and match* antara perguruan tinggi dengan pasar kerja. Menurut Ida, saat ini jumlah kelompok pekerja didominasi dari lulusan pendidikan SMP dan Sekolah Dasar. “Kelompok yang bekerja sebagian berpendidikan SMP ke bawah, justru yang menganggur lulusan SMK, diploma dan sarjana,” jelasnya.”

(Sumber: <https://ugm.ac.id/id/berita/23493-menaker-12-persen-pengangguran-di-indonesia-didominasi-lulusan-sarjana-dan-diploma/> diakses pada 29 Agustus 2023)

Berdasarkan berita diatas menunjukkan bahwa lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mendominasi kelompok kerja saat ini. Lulusan Diploma dan Sarjana mendominasi pengangguran sekitar 12%. Hal ini disebabkan karena tidak

adanya *link and match*. *Link and match* merupakan relevansi kompetensi atau pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja atau industri. Kurikulum dan sistem pendidikan di Indonesia harus menyesuaikan keahlian peserta didiknya dengan kebutuhan kerja saat ini. Hal ini dikarenakan tingginya angka pengangguran yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan seseorang. Melalui *link and match*, maka secara konseptual perguruan tinggi akan mencetak kompetensi tenaga kerja yang profesional dengan peluang yang cukup besar (Buana, 2022). SDM akan memperoleh pengalaman jauh lebih aktual melalui berbagai praktik dari pada hanya dengan teori pada kurikulum suatu perguruan tinggi (Sila et al., 2022). Kesesuaian antara kompetensi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini sangat penting untuk mengurangi tingkat pengangguran. *Link and match* akan mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi masa perpindahan dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

Kesesuaian antara kebutuhan kompetensi kerja dengan bidang pendidikan telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 pada bagian keempat standar proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran merupakan peraturan standar implementasi kegiatan belajar pada program studi di perguruan tinggi agar diperoleh capaian pembelajaran lulusan yang sesuai. Standar karakteristik proses pembelajaran harus memuat sifat saintifik, interaktif, integratif, holistik, kontekstual, efektif, tematik, kolaboratif, dan berorientasi kepada mahasiswa. Melalui proses ini, maka kegiatan belajar dapat mengutamakan pengembangan kreativitas, kebutuhan mahasiswa, serta

melibatkan interaksi antar berbagai pihak dalam mencapai tujuan yaitu capaian kegiatan belajar lulusan yang diharapkan.

Metode kegiatan belajar efektif wajib digunakan dalam proses kegiatan belajar dengan kegiatan kurikuler. Setiap mata kuliah dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran. Menurut Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 14 menyatakan metode pembelajaran dapat berupa kuliah, praktikum, seminar, responsi, penelitian, wirausaha, magang, pertukaran pelajar, pelatihan militer, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. Melalui metode pembelajaran efektif, maka diharapkan akan menghasilkan capaian lulusan yang sesuai dengan kebutuhan kerja saat ini. Oleh karena itu, pada tahun 2020 Menteri Kemendikbud RI Nadiem Anwar Makarim merilis kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM adalah perwujudan kegiatan belajar yang memiliki sifat otonom dan fleksibel sehingga akan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kebijakan ini mengacu kepada Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini diluncurkan seperti yang tertulis dalam berita [Antaraneews.com](https://www.antaranews.com):

**“Antaraneews.com-** Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan episode kedua dari Merdeka Belajar. Pendidikan tinggi ini memiliki potensi dan dampak tercepat dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Ini merupakan cara tercepat untuk mewujudkan itu ujar Nadiem dalam sambutannya. Kebijakan pertama adalah otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Kebijakan Kampus Merdeka yang kedua adalah

program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Sementara itu, kebijakan Kampus Merdeka yang keempat akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS)”.

(Sumber: <https://www.antarane.ws.com/berita/1263855/mendikbud-luncurkan-kebijakan-kampus-merdeka> diakses pada 30 Agustus 2023)

Berdasarkan berita diatas dijelaskan bahwa pokok-pokok kebijakan MBKM terdapat empat poin yaitu pembukaan perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, program studi baru, hak belajar tiga semester di luar prodi, dan kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN-BH (berbadan hukum). Mahasiswa dan perguruan tinggi memberikan respon baik terhadap kebijakan MBKM. Mahasiswa mengetahui poin tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendalami potensi kemampuan serta memberikan tantangan dan peluang yang sangat berharga dalam menciptakan kreativitas mahasiswa dalam menemukan informasi melalui pengalaman nyata dalam dunia profesional (Kusnadi et al., 2022).

Magang dan Studi Independen merupakan salah satu program dari Kampus Merdeka pada kebijakan keempat. Program MSIB dibagi menjadi dua kegiatan yaitu Magang Bersertifikat dan Studi Independen. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengasah kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan didunia kerja dengan program MSIB. Program MSIB memberikan pengalaman belajar secara nyata dan langsung melibatkan mahasiswa kedalam proyek atau permasalahan riil. Pengalaman belajar dan bekerja ini, akan dikonversi ke SKS mahasiswa sebanyak 20 SKS. MSIB

memberikan manfaat langsung kepada para mahasiswa dan juga sebagai jembatan bagi para mahasiswa untuk mengenal dunia kerja. Melalui program MSIB, mitra dapat memperoleh SDM berkualitas yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mitra tersebut.

Menurut data Kemendikbud RI (2023), pada *platform* Kampus Merdeka program MSIB yang dimulai pada tahun 2021 hingga saat ini telah berjalan pada angkatan empat telah diikuti oleh sekitaran 93.000 mahasiswa dari 700 perguruan tinggi. Kemudian jumlah mitra yang terlibat dalam pelaksanaan program sebanyak 250 lebih instansi, organisasi, kementerian, dan lembaga. Penerapan kebijakan Kampus Merdeka mampu meningkatkan kemampuan interpersonal dan peningkatan keterampilan teknis bagi mahasiswa (Wijayanto dan Wulandari, 2023).

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Wijayanto dan Wulandari (2023), menyatakan bahwa pada beberapa universitas terdapat tantangan dan kendala untuk menyesuaikan kurikulum, sistem akademik, dan dana pendanaan bagi peserta MBKM. Sedangkan pada penelitian implementasi kebijakan MBKM di FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur oleh Puspitasari & Nugroho (2021), menyatakan bahwa kebijakan MBKM belum terimplementasikan dengan baik dan dinilai kurang efektif. Kemudian, penelitian pada Kebijakan MBKM Program MSIB di Indonesia oleh Rahman et al. (2023), menyatakan terdapat faktor penghambat yaitu konversi kresit SKS masih belum terdapat standarisasi, aksesibilitas helpdesk yang lemah, dan pihak internal kampus yang masih belum optimal dalam mendukung kegiatan MBKM. Lalu, penelitian selanjutnya pada Kegiatan Magang Bersertifikat MBKM di Universitas

Abdurrab oleh Syamsuadi et al. (2022), menyatakan bahwa pelaksanaan Kegiatan Magang Bersertifikat masih terdapat kendala yaitu tidak adanya sistem konversi sks magang yang sesuai serta tidak terdapat tim khusus dalam melaksanakan Magang MBKM.

Salah satu PTN di Jawa Timur yaitu UPN “Veteran” Jawa Timur turut berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia melalui program MSIB. UPN “Veteran” Jawa Timur memiliki Visi menjadi universitas unggul berkarakter bela negara dan salah satu Misinya adalah mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial. Salah satu misi ini, menunjukkan bahwa UPN “Veteran” Jawa Timur berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang unggul dengan karakter bela negara. UPN “Veteran” Jawa Timur memiliki 8 fakultas program sarjana yaitu Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Arsitektur dan Desain, Hukum, Teknik, Ilmu Komputer, dan Kedokteran. Seluruh fakultas ini, telah melaksanakan kebijakan MBKM. Kebijakan MBKM di UPN “Veteran” Jawa Timur telah diatur dalam Peraturan Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur Nomor 03 tahun 2021 tentang Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Dalam bab 5 bentuk kegiatan pembelajaran MBKM bagian kesatu, telah diatur mengenai Magang/praktek kerja.

UPN “Veteran” Jawa Timur melaksanakan program MSIB angkatan pertama dimulai pada tahun 2021. Tujuan program MSIB secara umum adalah untuk memberikan kesempatan mahasiswa dalam menghadapi dinamika dan tantangan dunia

kerja serta keahlian yang wajib dikuasai oleh mahasiswa. Selain itu, MSIB berperan untuk meningkatkan keterserapan dan kesiapan mahasiswa dengan menyiapkan soft skills dan meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. Keterserapan lulusan dapat dilihat dari *tracer study* alumni (Trimurtini; et al., 2019). Tracer study dapat membantu untuk mengetahui kualitas alumni yang telah terserap dalam dunia kerja sehingga perguruan tinggi dapat mengevaluasi akademik untuk menyesuaikan kompetensi alumni sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Berikut merupakan data *tracer study* dari UPA PKK UPN “Veteran” Jawa Timur terkait dengan waktu tunggu bekerja lulusan UPN “Veteran” Jawa Timur sebelum adanya program MSIB pada tahun 2021:

Tabel 1. 1 Waktu Tunggu Lulusan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tahun 2021

Fakultas	Program Studi	Waktu Tunggu Bekerja (bulan)	Rata-Rata Waktu Tunggu Bekerja per-Fakultas (bulan)
Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan	2	2
	Manajemen	2	
	Akuntansi	2	
Pertanian	Agribisnis	2	2
	Agroteknologi	2	
Teknik	Teknik Kimia	2	2
	Teknik Industri	2	
	Teknologi Pangan	2	
	Teknik Lingkungan	2	
	Teknik Sipil	2	

Fakultas	Program Studi	Waktu Tunggu Bekerja	Rata-rata waktu tunggu per fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Administrasi Publik	2	2
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Administrasi Bisnis	2	
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Komunikasi	2	
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Hubungan Internasional	2	
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Pariwisata	-	
Arsitektur dan Desain	Arsitektur	2	2
Arsitektur dan Desain	Desain Komunikasi Visual	2	
Hukum	Hukum	2	2
Ilmu Komputer	Informatika	2	2
Ilmu Komputer	Sistem Informasi	2	
Total rata-rata waktu tunggu bekerja		2	2

Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2023

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2021, rata-rata waktu tunggu bekerja lulusan UPN “Veteran” Jawa Timur adalah 2 bulan. Waktu tunggu bekerja ini masuk kedalam Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi. IKU merupakan pelaksanaan kebijakan MBKM yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang IKU PTN menjadi 8 pokok.

Penghargaan IKU PTN-BLU IKU 1 dan IKU 2 telah didapatkan UPN “Veteran” Jawa Timur. IKU 1 yaitu alumni perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan yang layak. Sedangkan keunggulan IKU 2 yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar diluar kampus. IKU merupakan ukuran kinerja perguruan tinggi untuk

mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan luaran yang lebih konkret (Ambarita, 2023). UPN “Veteran” Jawa Timur telah berhasil mendapatkan penghargaan IKU 1 dan IKU 2. Hal ini sesuai dengan berita yang dilansir dari [upnjatim.ac.id](http://upnjatim.ac.id) yaitu:

**“Upnjatim.ac.id-** Di usianya yang ke 64 tahun, UPN Veteran Jawa Timur terus menorehkan prestasi yang membanggakan, pada 21 Juni 2023 lalu, UPN Veteran Jawa Timur mendapatkan 5 penghargaan sekaligus dalam Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Kemendikbud Ristek. Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Dirjen Dikti pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023 di Hotel JW Marriot Jakarta, Jumat (21/7). Penghargaan capaian IKU ini meliputi Pertumbuhan IKU terbaik PTN BLU, Top 10 Liga PTN BLU, Keunggulan IKU PTN-BLU IKU 1 (Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak), Keunggulan IKU PTN-BLU IKU 2 (Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus) dan Keunggulan IKU PTN-BLU IKU 8 (Program Studi Berstandar Internasional).”

(Sumber : <https://www.upnjatim.ac.id/borong-penghargaan-capaian-iku-upnjatim-beri-insentif-dana-pengembangan-prodi/> diakses pada 10 Oktober 2023)

Salah satu indikator dalam keberhasilan program MSIB yaitu untuk memenuhi IKU perguruan tinggi. Program MSIB dapat meningkatkan keterserapan kerja lulusan dan memperpendek masa tunggu alumni yang diukur dengan jumlah alumni MSIB yang mendapatkan tawaran untuk bekerja di mitra tempat program magang. Keunggulan IKU 1 yaitu alumni perguruan tinggi mendapat pekerjaan yang layak sehingga selaras dengan program MSIB. Kemudian keunggulan IKU 2 yaitu pengalaman belajar diluar perguruan tinggi yang diukur dengan jumlah mahasiswa peserta MSIB.

Selain waktu tunggu, kesesuaian antara bidang pendidikan dan pekerjaan juga perlu diperhatikan. Perguruan tinggi harus memberikan pembelajaran yang fleksibel

dengan metode pembelajaran efektif kepada mahasiswa untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi arus globalisasi pada berbagai bidang keahlian. Pembelajaran diluar kampus perlu diterapkan sesuai dengan IKU 2 perguruan tinggi untuk mempersiapkan lulusan menghadapi dunia kerja saat ini. Berikut merupakan data dari UPA PKK UPN “Veteran” Jawa Timur tentang keselarasan bidang pendidikan dengan pekerjaan alumni saat ini:

Tabel 1. 2 Kesesuaian Horizontal lulusan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Fakultas	Program Studi	Selaras	Tidak Selaras	Rata rata kesesuaian horizontal per fakultas	
		%	%	Selaras (%)	Tidak selaras (%)
Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan	76,66	23,4	84,42	15,59
	Manajemen	89,3	10,7		
	Akuntansi	87,32	12,68		

Fakultas	Program Studi	Selaras	Tidak selaras	Rata-rata kesesuaian horizontal per fakultas	
		%	%	Selaras	Tidak selaras
Pertanian	Agrobisnis	66,87	33,13	61,97	38,03
Pertanian	Agroteknologi	57,08	42,92		
Teknik	Teknik Kimia	72,41	27,59	75,9	23,2
Teknik	Teknik Industri	80,16	19,84		
Teknik	Teknologi Pangan	67,05	32,95		
Teknik	Teknik Lingkungan	77,22	22,78		
Teknik	Teknik Sipil	82,76	17,24		
Ilmu Sosial dan Politik	Administrasi Publik	73,99	26,01	72,60	27,39
Ilmu Sosial dan Politik	Administrasi Bisnis	87,33	12,67		
Ilmu Sosial dan Politik	Ilmu Komunikasi	86,24	13,76		
Ilmu Sosial dan Politik	Hubungan Internasional	42,86	57,14		
Arsitektur dan Desain	Arsitektur	87,8	12,2	89,35	10,64
Arsitektur dan Desain	Desain Komunikasi Visual	90,91	9,09		
Hukum	Hukum	77	23	77	23
Ilmu Komputer	Informatika	74,35	25,65	77,27	27,73
Ilmu Komputer	Sistem Informasi	80,19	19,81		

Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2023

Keselarasan horizontal adalah keselarasan antara bidang pendidikan yang telah ditempuh dengan bidang pekerjaan. Pada data diatas, ditemukan bahwa Fakultas

Arsitektur dan Desain memiliki keselarasan horizontal alumni yang tinggi yaitu sebesar 89,35%. Sedangkan Fakultas Pertanian memiliki ketidak selarasan paling tinggi yaitu sebesar 38,03%. Keselarasan horizontal bidang pendidikan dengan bidang pekerjaan ini dapat dipersiapkan mahasiswa melalui program MSIB. Salah satu tujuan dari program MSIB adalah untuk menyiapkan soft skills peserta dengan meningkatkan kesiapan kompetensi dan keterserapan peserta MSIB untuk menghadapi dunia kerja.

Salah satu fakultas yang melaksanakan program MSIB adalah Fakultas Pertanian atau FAPERTA. Saat ini, jumlah pendaftar kegiatan Magang Bersertifikat berdasarkan laporan Koordinator PT oleh Romadhona (2023), angkatan 4 di FAPERTA adalah sebanyak 1.798 mahasiswa dan peserta lolos kegiatan Magang Bersertifikat di FAPERTA adalah sebanyak 15 mahasiswa. Persentase kelulusan yang didapatkan pada FAPERTA adalah 0,0083. Persentase kelulusan ini sangat kecil jika dibandingkan dengan data persentase kelulusan pada fakultas lainnya.

Implementasi kebijakan menurut Edward III merupakan proses perancangan kebijakan yang memiliki akibat yang timbul terhadap subjek yang terkena dampak dari adanya kebijakan tersebut (Nurdin, 2019). Edward III mengemukakan 4 fokus penting dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan buku panduan pelaksanaan program MSIB tahun 2023 oleh Kemendikbud RI (2023), proses tahapan implelementasi program MSIB terdiri dari sebelum pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan.

Pada tahapan pertama adalah pra pelaksanaan. Sebelum pelaksanaan merupakan persiapan program meliputi kegiatan pembekalan bagi pihak pihak yang

terlibat seperti Mitra, Koordinator PT, DPP, Peserta MSIB. Sebelum pelaksanaan Program MSIB, terdapat kendala dalam pelaksanaan pembekalan kegiatan karena terdapat informasi yang tidak tersampaikan langsung kepada prodi. Berdasarkan wawancara pendahuluan kepada koordinator PT yaitu Mahimma Romadhona, S.T.,M.Ds. terdapat kendala dalam proses konsolidasi mitra yaitu:

“Kurang tersedia waktu yang cukup untuk menyampaikan informasi mengenai jadwal konsolidasi dengan mitra ke masing-masing prodi, sehingga beberapa sesi ada yang tidak dihadiri oleh perwakilan prodi. PIC tidak dapat membackup karena sedang menghadiri sesi konsolidasi lain di waktu yang bersamaan.”

(Hasil wawancara 19 September 2023)

Berdasarkan wawancara pendahuluan bersama Koordinator PT menyatakan bahwa pelaksanaannya proses konsolidasi mitra dengan UPN “Veteran” Jawa Timur tidak semuanya dihadiri karena keterbatasan jumlah Koordinator PT dan keterbatasan informasi jadwal konsolidasi mitra. Proses konsolidasi merupakan kesepakatan yang terjadi antara pihak perguruan tinggi dengan mitra tempat mahasiswa melaksanakan kegiatan magang. Pada proses konsolidasi ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi perguruan tinggi untuk mengakui nilai dan konversi sks bagi peserta. Mitra akan menjelaskan gambaran program magang yang akan dilaksanakan dengan Capaian Pembelajaran Program (CPP), model proses pembelajaran, serta evaluasi peserta magang.

Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan program. Pada proses ini peserta akan melakukan kegiatan Magang MSIB yang akan setara dengan 20 sks dalam satu semester. Kegiatan ini akan terdiri dari 900 jam dengan minimal 640 jam kegiatan yang terstruktur, dan 260 jam kegiatan mandiri. Dari setiap kegiatan yang dilakukan

tersebut, peserta diwajibkan untuk mengisi Logbook atau laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kemendikbud dan perguruan tinggi berupa laporan harian, mingguan, dan laporan akhir. Laporan kegiatan ini akan dilaporkan melalui *platform* Sistem Informasi Kolaborasi Terpadu Universitas, Pemerintah, Masyarakat, dan Industri atau Silaturahmi. *Platform* tersebut merupakan sistem informasi terpadu universitas, pemerintah, masyarakat, dan industri dalam mendukung kebijakan MBKM. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa dosen yang masih kebingungan dalam menggunakan aplikasi tersebut karena keterbatasan informasi dalam menggunakan *platform* tersebut. Selain itu, *platform* Silaturahmi tidak terintegrasi langsung pada *platform* Siamik. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Koordinator PT Mahimma Romadhona yaitu:

“Inovasi yang kami lakukan selanjutnya yaitu perbaikan dan maintenance dari *platform* Silaturahmi itu sendiri karena *platform* Silaturahmi tidak terintegrasi dengan siamik dan masih kita kembangkan sampai saat ini agar automatic. Selain itu, memberikan panduan penggunaan Silaturahmi agar pelaksanaan MBKM dapat termonitoring melalui *platform* ini”  
(Hasil wawancara 19 September 2023)

Berdasarkan wawancara pendahuluan tersebut bersama dengan Koordinator PT menyatakan bahwa UPN “Veteran” Jawa Timur memfasilitasi kegiatan MBKM dengan menghadirkan *platform* Silaturahmi sebagai bentuk monitoring terhadap kegiatan MBKM para mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, *platform* ini masih dibutuhkan perbaikan dan paduan penggunaan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak dalam pelaksanaan MBKM.

Tahapan yang ketiga adalah pasca pelaksanaan program. Kegiatan pasca pelaksanaan program merupakan evaluasi mahasiswa yang mengacu pada hasil nilai program MSIB ke dalam konversi pada mata kuliah di Program Studi. Berdasarkan wawancara awal kepada Koordinator PT yaitu Mahimma Romadhona, S.T.M.Ds. menyatakan bahwa terdapat permasalahan pada yaitu mengenai standar monitoring dan evaluasi pada penilaian program MSIB, yaitu:

“Kalau selama ini memang kami akui tidak sama evaluasi MSIB per fakultas terhadap mahasiswa. Yang satunya setelah MSIB selesai ada yang presentasi, dan ada yang nggak ada langsung keluar nilai, yang ini harus begini begini, luarannya berbeda-beda. Nah itu, yang harus kami susun untuk teknis monev MSIB harus seperti apa biar tidak beda-beda.”  
(Hasil wawancara 19 September 2023)

Berdasarkan wawancara pendahuluan tersebut, standar monitoring dan evaluasi selama ini tidak terdapat aturan yang jelas dari tingkat universitas. Sehingga pelaksanaan evaluasi kegiatan MSIB di tiap program studi dan fakultas berbeda-beda. Kegiatan monitoring dan evaluasi program akan dilakukan oleh seluruh pihak yang bersangkutan dalam evaluasi hasil kegiatan akhir program.

Berdasarkan latar belakang diatas, hasil observasi awal, berbagai data dan sumber berita dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai permasalahan hingga terdapat adanya kebijakan MBKM. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian implementasi kebijakan MBKM pada Kegiatan Magang Bersertifikat Program MSIB di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur karena terbukti Fakultas Pertanian memiliki ketidakselarasan horizontal yang tinggi antara bidang pendidikan dan pekerjaan diantara fakultas lainnya. Peneliti membatasi penelitian ini

pada Kegiatan Magang Bersertifikat karena peneliti ingin melihat kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja dimana mahasiswa terlibat dan ikut dalam aktivitas mitra magang sehingga memiliki keterlibatan langsung dan mendalam serta memiliki gambaran nyata dunia bekerja. Melalui kegiatan magang, mahasiswa dapat membangun dan memperluas jaringan koneksi dalam industri tempat magang sehingga mahasiswa lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. Kesiapan untuk menghadapi dunia kerja ini dapat terlihat dari waktu tunggu bekerja yang singkat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari tujuan dilaksanakannya kegiatan Magang Bersertifikat program MSIB Kampus Merdeka. Untuk melihat bagaimana kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis menggunakan model teori implementasi Edward III. Dalam teori Edward III terdapat faktor-faktor keberhasilan yang dapat mempengaruhi proses implementasi. Faktor faktor tersebut saling berhubungan langsung secara timbal balik dari keempat sasaran kajian (Nurdin, 2019). Sasaran kajian yang saling berhubungan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Kebijakan MBKM melalui Program MSIB pada Kegiatan Magang Bersertifikat di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Peneliti akan membatasi dan memfokuskan penelitian ini dengan tujuan permasalahan yang ingin diketahui yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan MBKM melalui Program MSIB pada Kegiatan Magang Bersertifikat di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Sebagai bentuk kepedulian akademi terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Magang Bersertifikat program MSIB di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur. Mengingat tingginya angka pengangguran yang didominasi oleh lulusan Sarjana dan Diploma. Melalui adanya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan, referensi dan sumber teori di masa mendatang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan literasi masyarakat umum sehingga dapat menambah informasi dan pengetahuan terkait kegiatan Magang Bersertifikat program MSIB dan manfaat dari kebijakan Kampus Merdeka Kemendikbud.

## 3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Menjadi bahan referensi bagi akademis yang memiliki lingkup serupa yaitu kebijakan MBKM. Selain itu sebagai instansi penelitian, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, evaluasi, atau kontribusi terkait Program MSIB dalam Kebijakan MBKM di UPN “Veteran” Jawa Timur.